

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Setiap negara/wilayah pasti menginginkan pertumbuhan ekonomi karena pertumbuhan ekonomi adalah pertambahan pendapatan masyarakat di negara atau wilayah tersebut secara keseluruhan. Dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi artinya pendapatan masyarakat meningkat sehingga meningkatnya pendapatan masyarakat dapat dikatakan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat lebih tinggi. Oleh karena itu pertumbuhan ekonomi penting untuk ditingkatkan.

Untuk menghitung pendapatan negara/wilayah awalnya menggunakan harga berlaku. Tapi untuk melihat pertambahan pendapatan dari waktu ke waktu atau yang disebut dengan pertumbuhan ekonomi menggunakan harga konstan. Pendapatan wilayah yang dilaporkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) tersedia angka dalam harga konstan dan harga berlaku.

Pendapatan wilayah menunjukkan beroperasinya faktor – faktor produksi di wilayah tersebut seperti tanah, modal, tenaga kerja, dan teknologi. Semakin banyak dan besar beroperasinya faktor – faktor produksi tersebut pendapatan wilayah yang didapat akan semakin tinggi. Semakin tinggi pendapatan wilayah tersebut tingkat kemakmuran di daerah tersebut akan semakin tinggi pula. Tingkat kemakmuran juga dapat dilihat seberapa besar pendapatan yang mengalir keluar wilayah atau seberapa besar dana yang didapat dari luar wilayah.

Boediono (1985: 1) mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan *output* per kapita dalam jangka panjang. Jadi, parameter yang digunakan untuk pertumbuhan *output* lebih tinggi di bandingkan dengan persentase pertambahan jumlah penduduk dan ada kecenderungan jangka panjang bahwa pertumbuhan ekonomi akan berlanjut. Namun pertumbuhan ekonomi lebih baik bersumber dari proses intern perekonomian tersebut. Hal seperti itu sangat penting untuk di perhatikan dalam perekonomian wilayah karena bisa jadi pertumbuhan ekonomi yang di alami wilayah tersebut berasal dari luar wilayah yang artinya wilayah tersebut mendapatkan aliran dana dari pusat sehingga wilayah tersebut mengalami pertumbuhan ekonomi namun jika aliran dana tersebut dihentikan maka pertumbuhan ekonomi wilayah tersebut akan terhenti. Dalam kondisi pertumbuhan wilayah yang mendapatkan aliran dana dari pusat sulit di katakan bahwa wilayah tersebut mengalami pertumbuhan karena pertumbuhan ekonomi wilayah tersebut muncul karena aliran dana yang cukup besar, terutama pada wilayah – wilayah yang terbelakang. Wilayah – wilayah yang terbelakang wajar kalau mendapatkan aliran dana yang lebih besar dari pemerintah pusat agar pertumbuhan ekonomi diwilayah tersebut dapat meningkat. Setelah mendapatkan aliran dana yang cukup besar wilayah tersebut dapat berkembang dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi wilayahnya dengan potensi yang dimiliki wilayah.

Untuk mengetahui perekonomian wilayah secara makro, pertumbuhan ekonomi dijadikan indikator utama karena memberikan implikasi kinerja perekonomian secara makro. Pertumbuhan ekonomi suatu wilayah menunjukkan perkembangan aktivitas ekonomi dalam suatu wilayah tersebut. Jika perkembangan aktivitas perekonomian dalam suatu wilayah tersebut tinggi maka

pertumbuhan ekonomi dalam wilayah tersebut juga semakin tinggi. Aktivitas ekonomi adalah aktivitas dalam produksi, konsumsi, dan investasi, semakin tinggi aktivitas ekonomi akan menyerap tenaga di wilayah tersebut maupun luar wilayah.

Selain pertumbuhan ekonomi, suatu wilayah juga harus memperhatikan pembangunan ekonomi. Karena pertumbuhan ekonomi tidak memandang kenaikan Gross Domestic Product atau Gross National Product (GDP/GNP) lebih besar atau lebih kecil dari tingkat pertumbuhan penduduk serta tidak memandang perubahan struktur ekonomi. Sedangkan dalam pembangunan ekonomi memperhatikan besar kecilnya tingkat kenaikan GDP/GNP terhadap pertumbuhan penduduk dalam suatu wilayah serta memperhatikan perubahan struktur ekonomi yang terjadi dalam suatu wilayah.

Irawan dan Suparmoko (2002) mengatakan bahwa pembangunan ekonomi adalah usaha – usaha untuk meningkatkan taraf hidup suatu bangsa yang seringkali diukur dengan tinggi rendahnya pendapatan riil per kapita. Oleh karena itu pembangunan ekonomi dalam suatu wilayah sangat di perlukan untuk meningkatkan taraf hidup manusia. Dengan strategi – strategi perencanaan pembangunan yang berkelanjutan, pembangunan ekonomi dalam wilayah akan terlaksana dengan baik serta generasi yang akan datang masih dapat merasakan dan melaksanakan pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi yang semakin bagus menjadikan pendapatan per kapita masyarakat menjadi lebih tinggi, sehingga taraf hidup masyarakat menjadi tinggi.

Dalam meningkatkan pertumbuhan dan pembangunan ekonomi, distribusi pendapatan juga harus diperhatikan. Pada saat tahap awal melakukan pembangunan ekonomi agar terciptanya pertumbuhan ekonomi pada tahap itu

pula distribusi pendapatan menjadi tidak tentu. Distribusi pendapatan tidak stabil karena pertumbuhan ekonomi cenderung menggunakan sektor modern untuk meningkatkan jumlah produksi. Sedangkan pada sektor tradisional jumlah produksi yang diperoleh akan lebih sedikit dibandingkan sektor modern. Hal tersebut akan mempengaruhi pendapatan masyarakat yang bekerja pada sektor modern dan tradisional. Masyarakat yang bekerja pada sektor modern pendapatannya lebih tinggi dibanding masyarakat yang bekerja di sektor tradisional. Agar distribusi pendapatan merata dapat ditunjang dengan meningkatkan keahlian masyarakat di sektor tradisional sehingga pendapatan masyarakat di sektor tradisional dapat meningkat dan distribusi pendapatan merata.

Untuk mengetahui distribusi pendapatan merata atau tidak dapat dilihat dari pendapatan per kapita setiap orang. Selisih pendapatan antara orang yang satu dengan orang yang lain itulah yang menunjukkan distribusi pendapatan merata atau tidak. Semakin tinggi selisih pendapatan per kapita antara orang yang satu dengan yang lain, berarti distribusi pendapatan tidak merata. Sebaliknya, selisih pendapatan per kapita antara orang yang satu dengan orang yang lain semakin kecil berarti distribusi pendapatan semakin merata.

Todaro (1995: 201) menyatakan bahwa pada tahun 1970-an tampak terdapat perubahan mencolok dalam persepsi masyarakat (swasta) dan pemerintah mengenai sifat utama kegiatan ekonomi. Di negara-negara kaya maupun miskin timbul rasa kecewa terhadap usaha – usaha untuk mengejar pertumbuhan ekonomi sebagai sasaran utama pembangunan. Di negara – negara maju, titik berat mereka tidak lagi pada pencapaian tingkat pertumbuhan ekonomi pada skala tertentu, melainkan lebih bergeser pada peningkatan 'kualitas kehidupan'.

Hal demikian itu tampak nyata pada munculnya gerakan – gerakan palestarian lingkungan. Terdengar seruan – seruan nyaring yang menghendaki agar laju pertumbuhan industri dikurangi, agar tidak semakin memperburuk kondisi lingkungan dengan polusi udara dan air bersih, agar sumber daya alam tidak dikuras habis-habisan, dan agar keindahan alam tidak menjadi objek perusakan oleh manusia yang tidak bertanggung jawab.

Perhatian utama negara – negara miskin dipusatkan pada masalah pertumbuhan yang menyangkut dengan distribusi pendapatan. Pada tahun 1960-an negara-negara di dunia ketiga banyak yang mengalami kenaikan pertumbuhan ekonomi relatif tinggi. Namun dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi ternyata memberikan masalah atau keuntungan yang tidak banyak bagi masyarakat miskin. Walau terjadi pertumbuhan ekonomi yang tinggi ratusan jiwa di Afrika, Asia, Timur Tengah dan Amerika Latin taraf hidup mereka tetap tidak ada perubahan, bahkan di sejumlah negara cenderung menurun, tidak hanya terjadi pada tahun 1960-an, tetapi juga terjadi di tahun 1970-an dan 1980-an. Distribusi pendapatan semakin tidak merata, ketimpangan pendapatan antara masyarakat yang kaya dengan masyarakat yang miskin semakin jauh. Tingkat pengangguran dan semi pengangguran di kota dan desa cenderung meningkat. Masyarakat merasa pertumbuhan ekonomi yang cepat tidak dapat mengatasi kemiskinan absolute.

Apabila ketimpangan pendapatan antar masyarakat/individu dapat terjadi, maka tidak menutup kemungkinan ketimpangan antar wilayah juga terjadi. Ketimpangan antar wilayah dapat terjadi penyebabnya bisa kandungan sumber daya alam dan perbedaan kondisi demografi yang terdapat di masing – masing wilayah. Untuk mengetahui ketimpangan antar wilayah dapat menggunakan

analisis tipologi wilayah dimana pada alat analisis ini dapat diketahui wilayah mana yang relatif maju dan wilayah relatif terbelakang.

Provinsi Jawa Timur merupakan salah satu provinsi yang ada di Pulau Jawa. Provinsi Jawa Timur memiliki 38 kabupaten/kota yang berada di Pulau Jawa dan Pulau Madura. Di pulau Madura terdapat 4 kabupaten dan kabupaten/kota sisanya berada di Pulau Jawa. Dengan terdapatnya 38 kabupaten/kota Provinsi Jawa Timur memiliki potensi di berbagai sektor yang tersebar di setiap Kabupaten/kota.

Terdapat pembentukan satuan wilayah pembangunan Gerbangkertosusila di Provinsi Jawa Timur. Gerbangkertosusila merupakan singkatan dari beberapa kabupaten/kota yang ada di Provinsi Jawa Timur. Kabupaten/kota yang masuk dalam Gerbangkertosusila adalah Gresik, Bangkalan, Mojokerto, Surabaya, Sidoarjo, Lamongan. Selain daerah Gerbangkertosusila di Provinsi Jawa Timur terdapat juga kawasan tapal kuda yaitu kawasan di Provinsi Jawa Timur sebelah timur yang bila dilihat dari peta kawasan tersebut berbentuk seperti tapal kuda. Daerah yang masuk dalam kawasan tapal kuda adalah Pasuruan, Probolinggo, Lumajang, Jember, Situbondo, Bondowoso dan Banyuwangi.

Dalam peraturan daerah Provinsi Jawa Timur nomor 5 tahun 2012 tentang rencana tata ruang wilayah provinsi tahun 2011 – 2013 menyebutkan pembagian untuk wilayah – wilayah yang ada di Provinsi Jawa Timur. Kabupaten/kota yang ada di Provinsi Jawa Timur dibagi menurut sistem perkotaan disertai dengan penetapan fungsi wilayah pengembangannya dan sistem perdesaan. Kabupaten/kota di provinsi Jawa Timur digolongkan menurut kawasan pusat kegiatan nasional (PKN), kawasan pusat kegiatan wilayah (PKW), kawasan pusat kegiatan wilayah promosi (PKWP), kawasan pusat kegiatan local (PKL).

Kawasan PKN terdiri dari kawasan perkotaan Gresik, Bangkalan, Mojokerto, Surabaya, Sidoarjo, Lamongan (Gerbangkertosusila) dan Malang. Kawasan PKW terdiri dari Probolinggo, Tuban, Kediri, Madiun, Banyuwangi, Jember, Blitar, Pamekasan, Bojonegoro dan Pacitan. Kawasan PKWP terdiri dari Pasuruan dan Batu, sedangkan kawasan PKL terdiri dari Jombang, Ponorogo, Ngawi, Nganjuk, Tulungagung, Lumajang, Sumenep, Magetan, Situbondo, Trenggalek, Bondowoso, Sampang, Kepanjen, Mejayan, Kraksaan, Kanigoro dan Bangil.

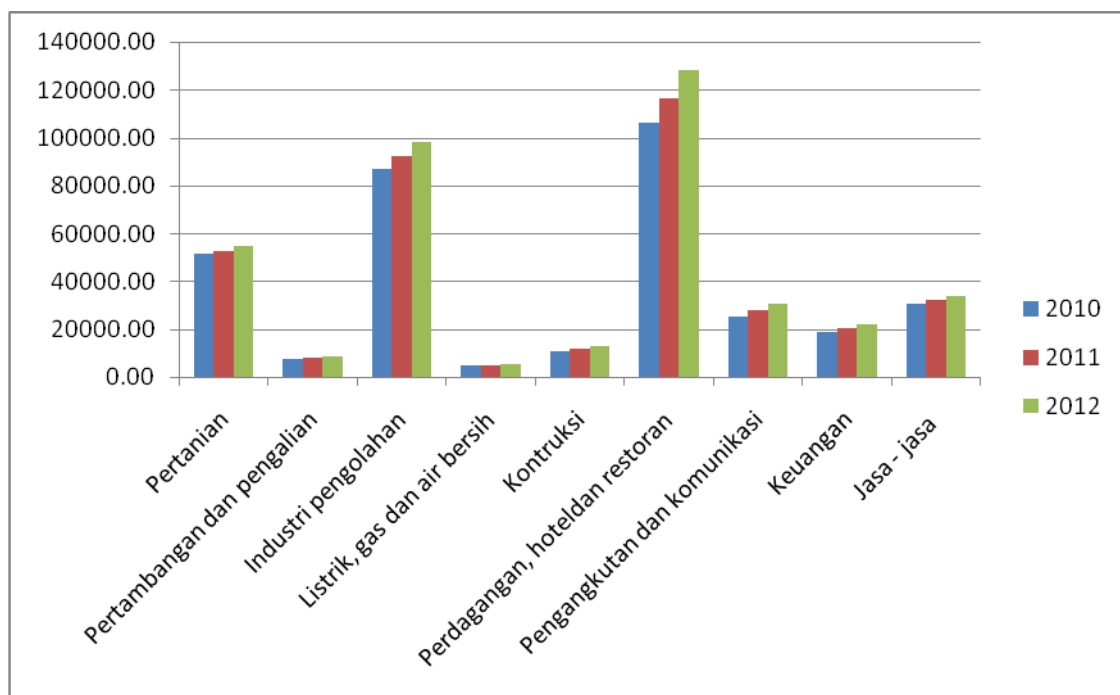
Pembagian kawasan ini menjadikan Provinsi Jawa Timur menarik untuk dilakukan penelitian tipologi wilayah yang berdasarkan pertumbuhan ekonomi dan PDRB per kapita. Untuk mengetahui apakah kawasan PKN merupakan kawasan dengan kabupaten/kota yang termasuk dalam klaster satu yang memiliki pertumbuhan ekonomi dan PDRB per kapita yang tinggi, atau sebaliknya. Begitu juga dengan kawasan PKW, PKWP dan PKL, apakah kabupaten/kota yang masuk dalam kawasan ini pengelompokannya sesuai dengan tipologi wilayah yang berdasarkan tingkat pertumbuhan ekonomi dan tingkat PDRB per kapita.

Terdapatnya kawasan Gerbangkertosusila dan kawasan tapal kuda menjadikan Provinsi Jawa Timur menarik untuk diteliti. Kedua kawasan tersebut saling berdekatan. Namun Produk Domestik Regional Bruto pada kawasan Gerbangkertosusila mayoritas lebih besar jika dibandingkan produk domestik regional bruto kabupaten/kota yang ada di kawasan tapal kuda. Dengan PDRB yang tinggi apakah kawasan Gerbangkertosusila memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi yang lebih besar jika dibandingkan dengan kawasan tapal kuda. Serta apakah ada perbedaan yang cukup mencolok pada ketimpangan PDRB antara kabupaten/kota yang ada di kawasan Gerbangkertosusila dan tapal kuda. Untuk

mengetahui letak kabupaten/kota yang termasuk dalam kawasan Gerbangkertosusila dan kawasan tapal kuda dapat dilihat pada gambar 1.2.

Gambar 1.1

Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Jawa Timur Atas Dasar Harga Konstan 2000 Menurut Lapangan Usaha Tahun 2010 – 2012 (Miliar Rupiah)

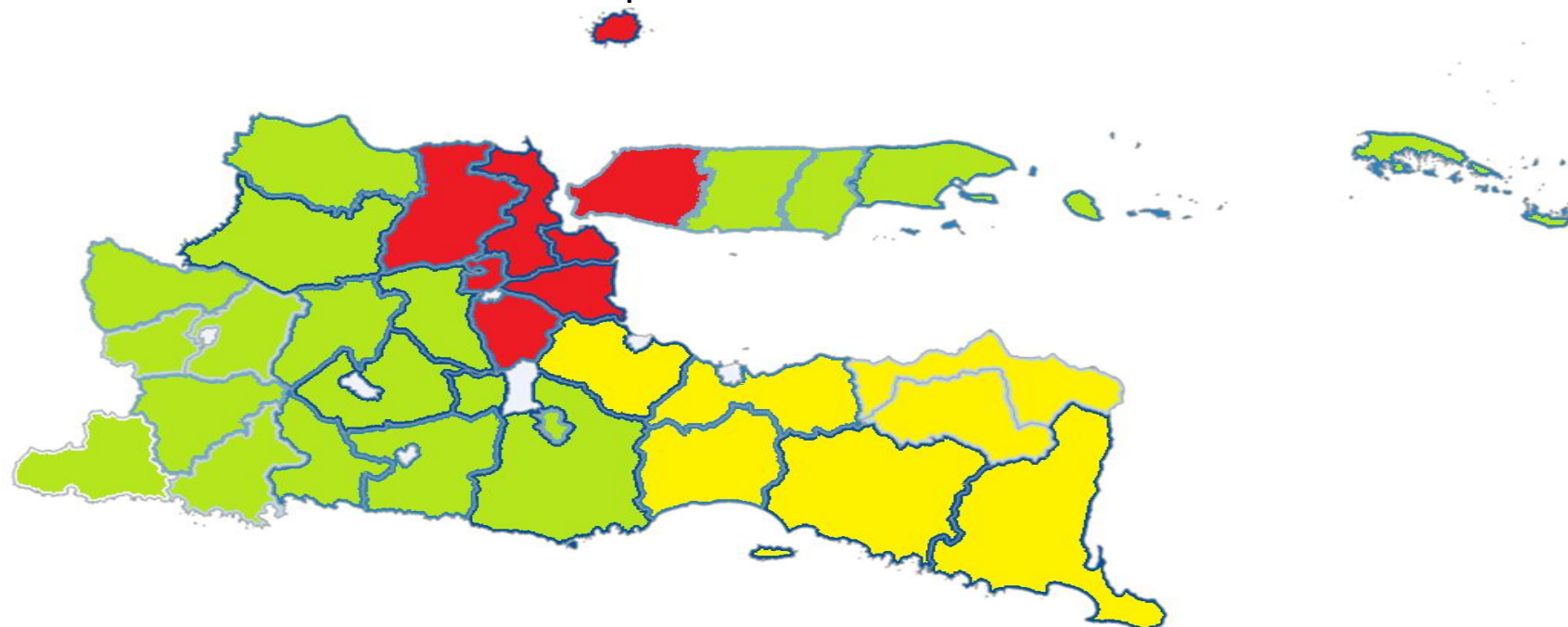


Sumber : PBS Jawa Timur

Gambar 1.1 menjelaskan bahwa Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Jawa Timur, mengalami kenaikan dari tahun 2010 sampai tahun 2012. Kenaikan produk domestik regional bruto Provinsi Jawa Timur ditunjang dengan kenaikan di semua sektor. Mulai dari sektor pertanian, sektor pertambangan dan pengalihan, sektor industri pengolahan, sektor listrik, gas dan air bersih, sektor konstruksi, sektor perdagangan, hotel dan restoran, sektor pengangkutan dan komunikasi, sektor keuangan, sektor jasa – jasa mengalami kenaikan dari tahun 2010 sampai tahun 2012. Tidak ada sektor yang mengalami penurunan produk domestik regional bruto dari tahun 2010 sampei tahun 2012.

Gambar 1.2

Peta Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Timur



Sumber : BPS Jawa Tumur (diolah)

Keteranagn :

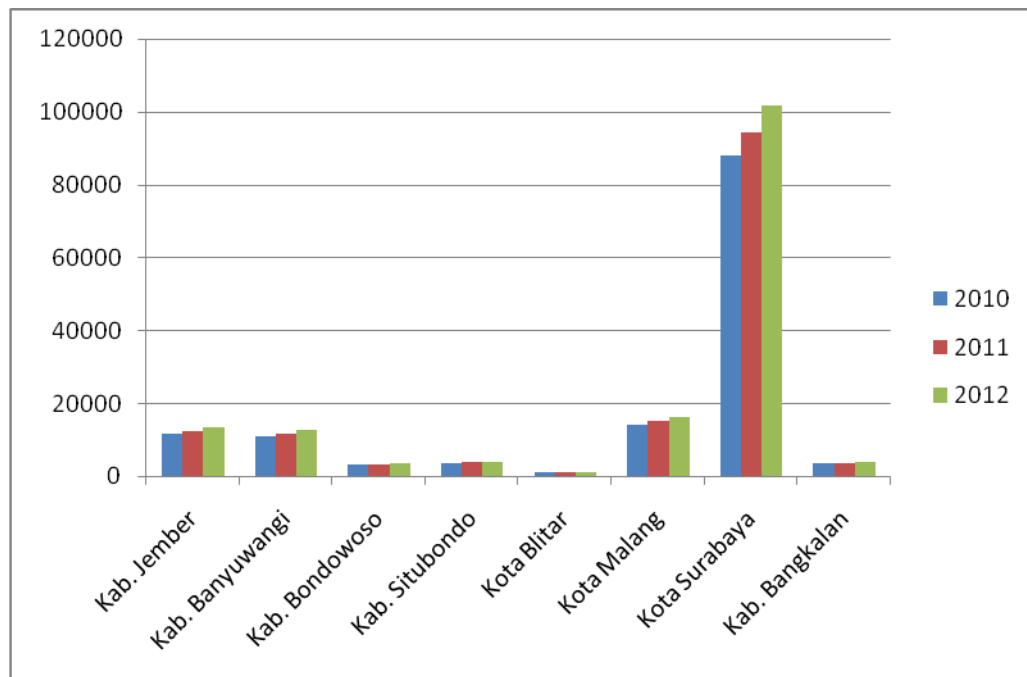
■ Kawasan Gerbangkertosusila

■ Kawasan Tapal Kuda

Meskipun semua kabupaten/kota yang ada di Provinsi Jawa Timur PDRBnya mengalami kenaikan, ada ketimpangan PDRB antar kabupaten/kota. Seperti di kawasan tapal kuda, ada ketimpangan PDRB antar kabupaten/kota. Kabupaten Jember dan Kabupaten Banyuwangi memiliki PDRB yang besar, pada tahun 2012 PDRB kedua kabupaten tersebut masing – masing mencapai 13,2 trilyun dan 12,6 trilyun. Sedangkan di Kabupaten Bondowoso dan Kabupaten Situbondo yang merupakan kabupaten yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Jember dan Kabupaten Banyuwangi hanya memiliki PDRB yang masing – masing sebesar 3,5 trilyun dan 3,9 trilyun pada tahun 2012. Selisih PDRB antar kabupaten tersebut cukup besar apalagi letak keempat kabupaten tersebut berbatasan langsung. Selain keempat kabupaten tersebut ketimpangan PDRB juga terjadi antara Kabupaten Malang dan Kabupaten Blitar. Pada tahun 2012 PDRB Kabupaten Malang mencapai 16,7 trilyun sedangkan Kabupaten Blitar PDRBnya hanya mencapai 6,4 trilyun. Selisih PDRB antara Kabupaten Malang dan Kabupaten Blitar mencapai 10 trilliun rupiah, padahal kedua kabupaten tersebut berbatasan langsung.

Ketimpangan PDRB antar kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur juga terjadi pada Kota Surabaya dan Kabupaten Bangkalan. Walau kedua wilayah tersebut sudah dihubungkan dengan jembatan suramadu selisih PDRB antara kedua wilayah tersebut cukup tinggi. Pada tahun 2012 PDRB Kota Surabaya mencapai 101,6 trilyun, sedangkan Kabupaten Bangkalan PDRBnya hanya mencapai 3,8 trilyun. Selisih PDRB Kota Surabaya dengan Kabupaten Bangkalan mencapai 90 trilliun. Untuk lebih jelas dalam melihat ketimpangan PDRB kabupaten/kota yang ada di Provinsi Jawa Timur dapat dilihat pada gambar 1.3

Gambar 1.3
Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten/Kota Tahun 2010 – 2012
(Miliar Rupiah)



Sumber : BPS Jawa Timur

Berangkat dari masalah yang telah disampaikan pada bagian sebelumnya maka perlu dilakukan penelitian ketimpangan PDRB dan tipologi wilayah di Provinsi Jawa Timur.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah pada penelitian ini, rumusan masalah yang diambil adalah sebagai berikut :

- 1 Seberapa besar tingkat ketimpangan PDRB kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur tahun 2010 – 2012 ?
- 2 Bagaimana klasifikasi kabupaten/kota yang ada di Provinsi Jawa Timur tahun 2010–2012 berdasarkan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita ?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui tingkat ketimpangan pendapatan perkabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur tahun 2010 – 2012.
2. Untuk mengetahui klasifikasi kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur tahun 2010 – 2012 berdasarkan pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan pendapatan.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Dapat dijadikan acuan oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam mengambil kebijakan yang bersinggungan dengan pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan pendapatan.
2. Dapat dijadikan referensi dalam bidang ilmu ekonomi khususnya dalam bidang ilmu ekonomi pembangunan.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan penelitian ini terdiri dari beberapa Bab yaitu, Bab I Pendahuluan, Bab II Tinjauan Pustaka, Bab III Metodologi Penelitian, Bab IV Hasil dan Pembahasan, Bab V Penutup.

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini menguraikan pendahuluan penelitian yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini menjelaskan tentang landasan teori yang digunakan dalam penelitian, penelitian terdahulu dan kerangka pemikiran penelitian.

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Dalam bab ini membahas pendekatan penelitian yang digunakan, definisi operasional, jenis dan sumber data, prosedur pengumpulan data dan teknik analisis.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini menguraikan gambaran umum objek penelitian, analisis hasil dan pembahasan.

BAB V : PENUTUP

Bab ini menguraikan kesimpulan dari penelitian dan saran.